



Radar Bali

ADD

6 M, Ruwet Terganjil APBDes

SEMARAPURA - Pencariran Alokasi Dana Desa (ADD) di Klungkung masih terganjal. Hal ini diakui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB, dan Pemerintahan Desa Putu Widiada. Diakuinya kalau dana ADD sekarang ini sudah masuk ke kas daerah sebesar 40 persen atau sekitar Rp 6 miliar. Saat ini diakui masih dalam proses pencariran di desa. Salah satu kendala yang masih mengganjal adalah belum semua desa memiliki APBDes di Klungkung. Selama APBDes belum punya maka dana tersebut belum bisa dicairkan. Sementara itu di Klungkung sendiri sebagian Desa sudah punya APBDes namun ada juga yang belum punya.

Untuk diketahui pencairan dana ADD tersebut dilakukan tiga termin. Termin pertama 40 persen yang sekarang ini sudah parkir di Kas Pemkab. Tahap kedua akan cair lagi 40 persen sementara termin ketiga cair 20 persen. "Kalau termin pertama sudah cair tinggal menunggu mekanisme di desa," ujarnya. Begitu APBDes sudah selesai maka akan dilakukan evaluasi. Begitu semuanya sudah siap maka dana tersebut akan segera cair. Uang akan di transfer langsung Bupati ke masing masing desa.

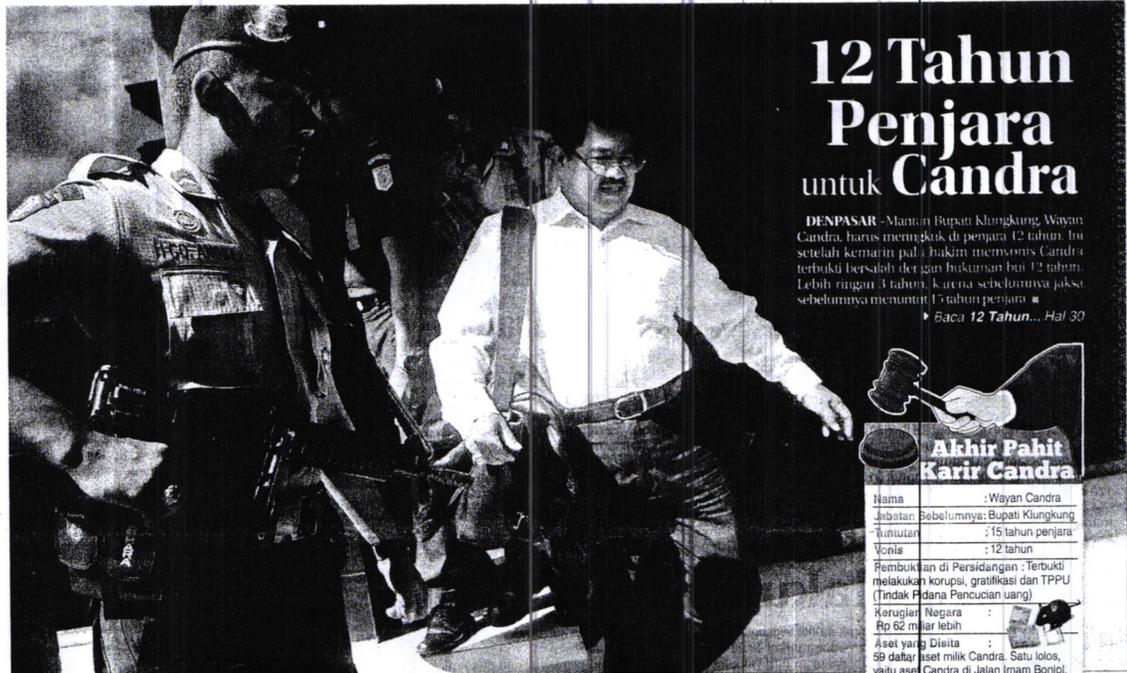
Sementara itu akhir Juni ini proses penyusunan APBDes di setiap Desa sudah rampung semua. Sementara itu menurut Perbekel Desa An, Banjarangkan, AA Rai Ardika yang juga Ketua Forum Berbekel Kecamatan Banjarangkan mengakui proses sekarang ini sedang tahapan di desa masing masing diakui juga kalau tidak semua desa sudah punya APBDes. (tra/gup)

Edisi : Kamis, 25 Juni 2015

Hal : 25



Radar Bali



12 Tahun Penjara untuk Candra

DENPASAR—Mantan Bupati Klungkung, Wayan Candra, harus menapak di penjara 12 tahun. Itu setelah kemarin palu hakim memvonis Candra terbukti bersalah dengan hukuman bui 12 tahun. Lebih ringan 3 tahun, karena sebelumnya jaksa sebelumnya menuntut 15 tahun penjara. ■

► Baca 12 Tahun... Hal 30

Akhir Pahit Karir Candra

Nama	: Wayan Candra
Jabatan	: Sebelumnya: Bupati Klungkung
Tuntutan	: 15 tahun penjara
Vonis	: 12 tahun

Pembuktian di Persidangan : Terbukti melakukan korupsi, gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian uang)

Kerugian Negara : Rp 62 miliar lebih

Aset yang Disita : 59 daftar aset milik Candra. Satu lolos, yaitu aset Candra di Jalan Imam Bonjol, lantaran sedang dilelang

ERBUKTI KORUPSI : Wayan Candra dikawal polisi saat hendak masuk mobil tahanan kejaksaan sesuai vonis, kemarin.

59 Aset Dirampas untuk Negara

■ 12 TAHUN...

Sambungan dari hal 21

Sidang kemarin dipimpin Hakim Hasoloan Sianturi, dengan hakim anggota Sumali dan Hakim Hartono. Sedangkan tim jaksa yang hadir adalah Made Pasek dan kawan-kawan. Candra didampingi pengacara Warsa T. Bhuana dan Nyoman Putra.

Hakim secara bergilir membacakan vonis, bahkan butuh waktu sekitar 2 jam lebih. Sampai akhirnya, Hasoloan membacakan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. "Yang memberatkan pertama, terdakwa semestinya melakukan penyelenggaraan negara dengan bersih dan jujur. Untuk bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat," ungkap Hasoloan.

Sedangkan yang memberatkan kedua adalah, Candra sebelum menjadi bupati adalah penegak hukum, semestinya memberikan teladan. Bahkan selama sidang, Candra tidak dianggap menunjukkan

penyesalan dan rasa bersalah. Sedangkan yang meringankan adalah belum pernah dihukum, sopan dan berstatus sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai tanggungan.

Hasoloan memastikan Candra terbukti melakukan korupsi, gratifikasi dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian uang). "Silakan terdakwa berdiri," ujar Hasoloan.

Setelah Candra berdiri baru dibacakan hakim hukuman 12 tahun. "Menghukum terdakwa dengan hukuman 12 tahun penjara," ungkapnya.

Candra telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan tindak pidana gratifikasi yang dianggap sebagai suap sebagaimana Pasal 12 B jo Pasal 12 C UU Tipikor jo Pasal 65 KUHP dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesuai Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 64 KUHP.

Selain hukuman penjara, terdakwa juga dihukum denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Artinya jika tidak membayar denda, hukumannya ditambah 6 bulan penjara. Selain itu juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara Rp 1.176.000.000. hasil penjualan lahan atas nama Anggara dan Budi. Jika tidak mengembalikan, asetnya disita dan jika tidak memenuhi hukumannya ditambah 2 tahun penjara.

Tak hanya itu vonis hakim juga memutuskan untuk menyita 59 daftar aset milik Candra. Satu lolos yaitu aset Candra di Jalan Imam Bonjol, lantaran sedang dilelang.

Sesuai daftar, aset pertama Sebidang tanah yang terletak di Desa Bunga Mekar Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dengan luas 9.450 M2 atas nama I Nengah Nata Wisnaya sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 677. Aset dengan nomor daftar 11 diserahkan ke pemenang lelang. Dan aset nomor 60, Uang sejumlah Rp. 764.588.196,- sebagai Booking Fee

dan Uang Muka (DP) atas pembelian 1 (satu) unit Office (Kantor) di Agung Podomoro Land Tower (APL Tower) di Central Park Lt. 23 Unit T.9 jalan S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat.

Jika dibandingkan dengan tuntutan, memang pengembalian kerugian negara dari Rp 42 miliar lebih menjadi Rp 1,17 miliar. Selain turun dari tuntutan 15 tahun divonis 12 tahun. Usai sidang hakim memiliki pertimbangan. "Kami punya pertimbangan bahwa, asetnya sudah disita. Sehingga kerugian negara yang dikembalikan hanya hasil uang yang didapatkan terdakwa dari APBN yaitu penjualan lahan itu. Kalau aset disita dan uang hasil gratifikasi dikembalikan, jadinya dobel," ungkap Hasoloan.

Dalam sidang kemarin, baik jaksa ataupun terdakwa menyatakan pikir - pikir. Seperti halnya berita sebelumnya dari tiga kasus yaitu Korupsi, TPPU dan gratifikasi Candra dianggap merugikan negara Rp 62 miliar lebih. (art/pit)

Edisi : Kamis 25 Juni 2015
Hal : 21



Radar Bali

Bandel, Restoran di Jatiluwih Ditutup

Pemilik hingga Camat Mengaku Tak Tahu

TABANAN - Satpol PP Tabanan terpaksa melakukan tindakan tegas dengan menutup pembangunan warung atau-restoran di kawasan WBD Jatiluwih Penebel. Peralnya pihak investor tidak mengantongi izin. Lucunya, penutupan tersebut tanpa sepengetahuan pemilik, kapolsek, hingga

Camat Penebel.

"Terpaksa pembangunan restoran atau warung itu kami hentikan karena tidak mengantongi izin," tegas Kepala Satpol PP I Wayan Sarba, Rabu (24/6) kemarin. Sarba menyayangkan investor secara diam-diam tetap melanjutkan pembangunannya walau belum mengantongi izin yang lengkap. Terlebih sebelumnya pada Senin, 1 Juni lalu pemilik telah dipanggil usai

disidak juga telah menandatangani BAP atau surat pernyataan untuk bersedia menghentikan kegiatan tersebut. "Setelah membuat surat pernyataan dan tanda tangan, justru mereka sembunyi-sembunyi malah kerja lagi. Terpaksa kami tutup," tegasnya.

Dijelaskan dengan ditetapkannya Jatiluwih menjadi Warisan Budaya Dunia (WBD) investor tidak diizinkan membangun

sembarangan di kawasan tersebut. Peralnya, Bapeda tengah membuat aturan zonanisasi (tata ruang) dan belum rampung. Sambil menunggu zonanisasi rampung Bupati Tabana telah mengeluarkan surat edaran untuk status quo pembangunan di wilayah tersebut. "Atas dasar inilah kami tegas melakukan pengawasan. Peralnya kawasan ini menjadi sorotan tidak hanya dari propinsi melainkan juga

dari pusat," bebarnya.

Celaknya aksi penutupan itu tidak banyak yang tahu. Baik pemilik, bahkan pejabat setempat seperti Kapolsek Penebel AKP Sri Subakti dan Camat Penebel Hendra Manik mengaku tidak tahu menahu soal aksi penutupan oleh satpol PP itu. "Kami tidak tahu sekali soal penutupan tersebut, tidak ada koordinasi sama sekali," ucap Sri Subakti dan Hendra Manik kompak. (gin/enn)

Edisi : Kamis, 25 Juni 2015

Hal : 25



Radar Bali

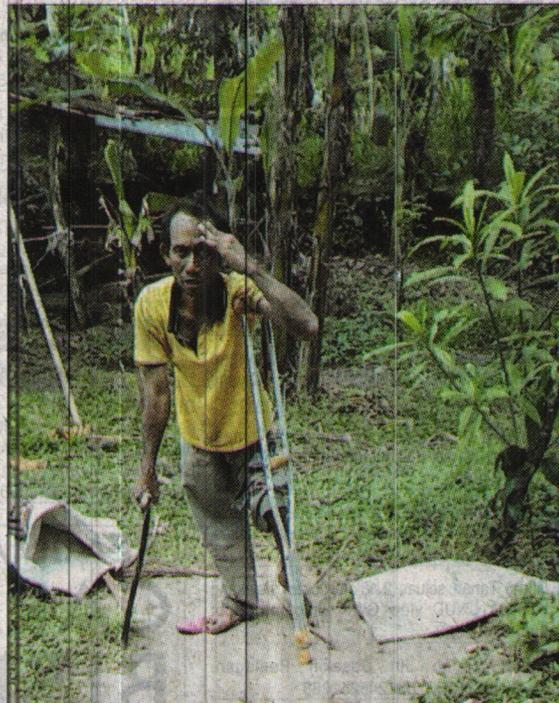
Cacat, Luput dari Bantuan Pemerintah

BANGLI - Berjalan tertatih tatih dengan bantuan dua tongkat sudah dilakoni Dewa Ketut Aryanta, 42. Namun demikian penyandang cacat warga Dusun Pembungan, Tambahan, Tembuku, itu luput dari bantuan pemerintah.

Saat ditemui Rabu (24/6) di kebunnya, Aryanta terlihat sedang berkeliling untuk melihat apakah ada monyet yang merusak tanamannya. Dengan bantuan dua tongkat, Aryanta, memang setiap hari hanya bisa menunggui kebunnya karena tidak bisa lagi melakukan pekerjaan lain lantaran cacat yakni kedua kaninya kecil dan tulang punggungnya melengkung yang dideritanya sejak kecil. "Saya cacat seperti ini sejak umur tiga tahun," ujarnya. Anak keempat dari lima bersaudara itu saat ini hidup bersama adiknya Dewa Putu Ardika. Setiap pagi dia berangkat ke kebunnya yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumahnya dengan berjalan kaki sambil membawa bekal nasi, sehabis Aryanta menjaga kebunnya agar tidak diserang monyet, sambil memelihara sapi dan ayam.

"Pagi saya berangkat dan petang baru pulang. Saya hidup meunpang dari adik baik makan dan lainnya," ujar peria yang masih membujang itu.

Meski menyandang cacat namun Aryanta tidak didata oleh pemkab dan tidak mendapat bantuan penyandang cacat seperti yang lainnya. Memang Aryanta sempat diberikan pelatihan oleh yayasan Darmais. Kemudian tahun 1997 diberikan bantuan mesin jahit oleh dinas sosial pemkab Bangli. Namun baru seminggu mesin jahit itu diberikan sudah diambil lagi oleh petugas. Setelah itu Aryanta tidak pernah lagi mendapat bantuan apa-apa. "Saya juga tidak pernah di data. Dan sampai sekarang tidak pernah mendapat bantuan," ungkapnya. Adiknya memang sempat menanyakan ke dusun dan desa dan dikatakan kalau tidak ada lagi bantuan karena dirinya sudah di tanggung oleh adiknya. Ada juga petugas mengatakan kalau dirinya sudah lanjut usia sehingga tidak layak mendapat bantuan lagi. (nom/gup)



ANOM SUARDANA/RADAR BALI

TAK MENYERAH: Dewa Ketut Aryanta tetap semangat bekerja meski kedua kakinya cacat.

Edisi : Kamis, 25 Juni 2015

Hal : 25



Radar Bali

Dewan Apresiasi WTP, juga Kritisi Pemkab Tabanan

TABANAN - Lima Fraksi di DPRD Tabanan mulai Fraksi PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, dan Fraksi Gabungan Hanura Nasdem memberikan apresiasi terhadap Pemkab Tabanan atas opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap pelaksanaan APBD 2014. Hal itu diungkapkan masing-masing juru bicara Fraksi dalam sidang paripurna DPRD Tabanan, Rabu kemarin (24/6).

Agenda Sidang Paripurna DPRD Tabanan mengagendakan pembacaan Pemandangan Umum masing-masing Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014. Sebelum mengkritisi Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ), masing-masing juru bicara menyampaikan apresiasi Pemkab atas WTP. "Ini adalah yang kali pertama Pemkab Tabanan dapat WTP dan merupakn reward kepada bupati diakhir masa jabatannya," ucap Ketua Fraksi Demokrat IGM Purnayasa.

Meski demikian, pihaknya tetap



KETUT SUGINA/RADAR BALI

KONTROL KINERJA EKSEKUTIF: Suasana Sidang Paripurna DPRD Tabanan, Rabu kemarin (24/6).

memberikan catatan kepada Pemkab Tabanan untuk tidak terlena dengan capaian tersebut. Ini karena di samping

item temuan pada sistem pengendalian internal (SPI) serta 11 item yang berkenaan dengan azas kepatuhan.

Catatan yang sama juga disampaikan Fraksi PDI Perjuangan yang pemandangan umumnya dibacakan oleh I Made Suarta. Dalam pemandangan umumnya, sekalipun fraksinya memberikan apresiasi yang tinggi atas opini WTP tersebut, pihaknya tetap mendorong Pemkab Tabanan untuk melakukan perbaikan. Sebab dalam pandangan Fraksi ini, opini WTP bukanlah implementasi atas sempurnanya laporan keuangan. "Sehingga Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar temuan yang direkomendasikan BPK segera diperbaiki," kata Suarta.

Selain memberikan apresiasi kelima Fraksi yang ada di DPRD Tabanan juga sepakat untuk melanjutkan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pengelolaan APBD 2014 yang diajukan Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti sehari sebelumnya. (gin/djo)

Edisi : 25 Juni 2015

Hal : 23



Radar Bali

Dewan Badung Ragukan Pemprov Bali

Soal Ambil Alih Puluhan SMA/SMK

MANGUPURA - Rencana pengambilalihan pengelolaan sekolah tingkat SMA/SMK di kabupaten Badung oleh Pemprov Bali mendapat tentangan dari kalangan Komisi IV DPRD Badung yang membidangi pendidikan. Dewan meminta Pemprov tidak terburu-buru mengambilalih sekolah di Badung karena berpengaruh pada nasib sekolah. Anggota Komisi IV DPRD Badung

mengaku khawatir Pemprov Bali tidak mampu memberikan jaminan lebih baik. Selain itu juga akan berdampak pada pengagaran untuk sekolah tersebut pada bulan oktober 2016.

Menurut Parwata, jika seluruh sekolah SMA/SMK "diakuisisi" Pemprov Bali, maka Pemkab Badung tidak bisa menggagalkan lagi dana untuk sekolah. Padahal, SMA/SMK di Badung masih butung anggaran untuk biaya sarana dan prasaran infrastruktur utamanya pengembangan lahan. "Apakah Pemprov siap menjamin kualitas

pendidikan yang sudah berjalan baik? Kalau tidak bisa akan terjadi stagnan pendidikan, tunjangan guru menurun, dan saya khawatir akan terjadi ketimpangan ini." Tandas Parwata di gedung dewan kemarin (24/6).

Parwata meminta Pemkab Badung mengajukan surat permohonan penundaan pemberlakuan Undang-Undang pemerintah daerah khusus untuk bidang pendidikan ini. Menurutnya, dewan sangat setuju dengan regulasi baru, namun harus benar-benar sudah siap dengan segala

konsekuensi. "Hal ini sangat mengundang keraguan secara psikologis. Badung minimal butuh Rp 100 miliar untuk dana pendidikan tahun 2015, jika provinsi mampu pembiayaan ini mesti berkelanjutan," sodoknya lagi.

Sebelumnya, Bupati Badung AA Gde Agung juga mengkhawatirkan masalah ini. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 23 mengamanatkan SMA dan SMK pengelolaannya akan diambil alih oleh Provinsi. Seperti SMK Pertanian di Petang yang dibangun mulai dari nol, dan kini peminatnya semakin banyak. **(san/han)**

Edisi : Kamis, 25 Juni 2015

Hal : 27



Radar Bali

Karo Keuangan IB Arga Diperiksa

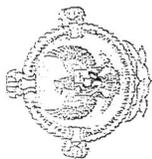
DENPASAR - Dugaan korupsi dalam pelaksanaan PHR Badung dan Denpasar, kembali dilanjutkan kemarin (24/6). Kali ini Karo Keuangan Pemprov Bali IB Arga yang diperiksa oleh Tim Jaksa Kejati Bali.

Kasipenkum Kejati Bali Ashari Kurniawan membenarkan memang ada pejabat Pemprov bernama IB Arga yang diperiksa. "Ada IB Arga yang diperiksa, terkait kasus PHR. Yang melakukan pemeriksaan adalah Jaksa Made Tangkas," ujar Ashari, kemarin.

Apa isi pemeriksaan? "Ini masih penyelidikan, tidak bisa dibuka lho, sebenarnya," ungkapnya. Sedangkan kasus iklan redame Kota Denpasar, Ashari mengaku belum dapat penjelasan dari Jaksa Made Subawa. "Saya dijanjikan hari ini (kemarin) namun belum dikasi juga," ungkapnya. (art/han)

Edisi : 25 JUNI 2015

Hal : 27



PDAM Denpasar Cuma Cakup 45 Persen

Daftar Tunggu Tembus 5137

DENPASAR - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Denpasar dengan kapasitas produksi mencapai 1.260,46 liter/detik pada tahun 2015 ini ternyata belum bisa memenuhi kebutuhan sesungguhnya. Bahkan, dengan produksi tersebut, cakupan pelayanan PDAM Kota Denpasar baru mencapai 45 persen dari jumlah penduduk.

"Kami akui memang ada defisit, yakni antara *suplai* dan *demand* ada selisih

200 liter/detik. Yang dampaknya, Denpasar Barat dan Denpasar Utara masih belum bisa kami atasi kekurangannya," ujar Direktur Utama PDAM Kota Denpasar, I Putu Gede Mahaputra di sela-sela temu pelanggan, di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Blusung, Peguyangan, Rabu kemarin (24/6).

Rendahnya cakupan pelayanan PDAM Kota Denpasar ini, Mahaputra beralih sumber air baku di Kota Denpasar sangat terbatas. *Nah*, untuk mengatasi keterbatasan pasokan sumber air, maka harus "mengimpor" dari SPAM di Tukad Petanu, Gianyar dan

KONDISI PDAM DENPASAR

- Kapasitas produksi: 1.260,46 liter/detik
- Cakupan pelayanan : 45 persen dari jumlah penduduk
- Daftar tunggu: 5137 orang
- Penyebab: Sumber air baku di Kota Denpasar sangat terbatas
- Dampak: wilayah Denpasar Barat dan Denpasar Utara kekurangan.
- Upaya: "Mengimpor" air dari Tukad Petanu, dan Tukad Penet. Proyek pipa Waribang-WR Supratman sedang digarap untuk mendatangkan dari Tukad Petanu. Tahun 2016, dari Tukad Penet baru digarap.

SPAM di Tukad Penet, Badung. Untuk segera menggarap proyek pemasangan suplai dari SPAM Petanu, pihaknya pipa Waribang-WR Supratman, dengan

harapan air dari Tukad Petanu masuk ke tengah Kota Denpasar. "Setelah proyek tersebut terealisasi, dari Blusung jadinya akan fokus airnya digiring ke barat dan utara," jelasnya.

Setelah proyek pipa distribusi Waribang-WR Supratman tersebut selesai, katanya, akan digarap juga suplai air dari Tukad Penet. Hanya saja untuk

Tukad Penet akan terlaksana tahun 2016 mendatang. Dia mengklaim sebenarnya sudah siap, namun provinsi yang belum siap memasang pipa setelah putus kontrak. Artinya tahun 2016 air dari Tukad Penet baru ma-

suk ke Denpasar Barat dan Denpasar Timur," jelas Gede Mahaputra.

Saat ini, menurut Gede Mahaputra, jumlah pelanggan PDAM hingga April 2015 sebesar 78.418. Sementara untuk pemakaian air sendiri

hingga April sebesar 1.962.508 meter kubik. Rendahkan produksi ini pun berdampak langsung terhadap pelanggan maupun calon pelanggan. Khususnya pada daftar tunggu.

"*Nah*, untuk daftar tunggu permohonan sambungan baru sampai saat ini, kami mencatat ada 5.137 orang," pungkasnya. (hen/yor)

Edisi : Kamis, 25 Juni 2015

Hal : 22